



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR



0251. 8318191



<https://satpolpp.kotabogor.go.id>



Jl. A. Yani No.65, RT 04 / RW 05 Tanah

Sareal, Kota Bogor,

Jawa Barat 16161

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tahun 2025 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yang telah dicanangkan pada tahun 2025 telah berhasil dicapai.

Dari capaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tahun 2025, menunjukkan bahwa capaian pada enam indikator sudah masuk pada kategori tinggi. Pencapaian IKU pada sasaran strategis Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada

Perda/Perkada dengan indikator kinerja Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada dimana pencapaiannya mencapai 2581% serta pada sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Dengan indikator kinerja Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja dengan pencapaian sebesar 100%, indikator kinerja Kepatuhan Pengelolaan Keuangan 92,88%, indikator kinerja Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100) 0%, Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida 100%, serta sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah 101,1%.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor ke depan yaitu ;

1. Meningkatkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum/ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan masyarakat, dan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Secara internal perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bagian sehingga dapat integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dapat terlaksana dengan optimal.

4. Melakukan analisa terhadap beberapa indikator yang tidak tercapai sebagai bahan perbaikan pada tahun berikutnya.
5. Melakukan penyesuaian besaran target kegiatan dengan anggaran yang tersedia.



KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor telah selesai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pelaporan kinerja.

Selain itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 secara umum berpedoman pada aspek-aspek pengelolaan keuangan daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Dokumen ini mengungkapkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Tujuan penyusunan antara lain untuk, mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan terpercaya. Disisi lain Laporan ini dimaksudkan pula sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelola





sumberdaya yang didasarkan pada perencanaan stratejik yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 ini bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Bogor, 25 Februari 2025

Plt. Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja



RAHMAT HIDAYAT, S.Sos, MM
NIP. 197408181993031001



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.3.1 Susunan Organisasi	2
1.3.2 Data Kepegawaian	5
1.3.3 Cascading Kinerja	6
1.3.4 Peta Proses Bisnis	7
1.3.5 Aspek Strategis Organisasi	8
1.3.6 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan..	13
2.1.1 Visi dan Misi RPJPD 2005-2025	14
2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	15
2.1.3 Strategi, kebijakan dan Program	17
2.2 Perjanjian Kinerja	18
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	23
3.2 Realisasi Anggaran.....	65
3.3 Analisis Efesiensi.....	82
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	83
4.2 Rekomendasi.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.....	5
Tabel 1.2	Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja	9
Tabel 1.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	10
Tabel 1.4	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	12
Tabel 2.1	Ringkasan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor 2025 - 2026	15
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	16
Tabel 2.3	Strategi, Kebijakan, Program	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja	18
Tabel 2.5	Rencana Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025.....	22
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	24
Tabel 3.2	Realisasi IKU	25
Tabel 3.3	Program Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran trantibum dan pelanggaran perda / perkara	33
Tabel 3.4	Analisis Efisiensi Sumber Daya	33
Tabel 3.5	Program Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	40
Tabel 3.6	Analisis Efisiensi Sumber Daya	40
Tabel 3.7	Program Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	45
Tabel 3.8	Analisis Efisiensi Sumber Daya	46

Tabel 3.9	Program Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	51
Tabel 3.10	Analisis Efisiensi Sumber Daya	51
Tabel 3.11	Program Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	52
Tabel 3.12	Program Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	64
Tabel 3.13	Analisis Efisiensi Sumber Daya	64
Tabel 3.14	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	65
Tabel 3.15	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	67
Tabel 4.1	Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	3
Gambar 1.2	Cascading Kinerja	7
Gambar 1.3	Peta Proses Bisnis	8
Gambar 3.1	Data Capaian Kinerja Tahun 2025	26
Gambar 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	27
Gambar 3.3	Diagram Perbandingan Capaian Persentase penurunan pelanggaran trantibum dan pelanggaran Perda / Perkada	28
Gambar 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra	29
Gambar 3.5	Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi	30
Gambar 3.6	Data Capaian Kinerja Tahun 2025	35
Gambar 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	35
Gambar 3.8	Diagram Perbandingan Capaian Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	36
Gambar 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra	37
Gambar 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kota, Provinsi, Nasional	37
Gambar 3.11	Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi	38
Gambar 3.12	Data Capaian Kinerja Tahun 2025	41
Gambar 3.13	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	42

Gambar 3.14	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra	43
Gambar 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kota, Provinsi, Nasional	43
Gambar 3.16	Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi	44
Gambar 3.17	Data Capaian Kinerja Tahun 2025	47
Gambar 3.18	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	47
Gambar 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra	48
Gambar 3.20	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kota, Provinsi, Nasional	49
Gambar 3.21	Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi	50
Gambar 3.22	Data Capaian Kinerja Tahun 2025	53
Gambar 3.23	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	53
Gambar 3.24	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra	54
Gambar 3.25	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kota, Provinsi, Nasional	55
Gambar 3.26	Data Capaian Kinerja Tahun 2025	58
Gambar 3.27	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	59
Gambar 3.28	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Akhir Renstra	60
Gambar 3.29	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kota, Provinsi, Nasional	61
Gambar 3.30	Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 mengamanatkan agar instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dan kinerja. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun rencana yang didukung oleh pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) baik nasional maupun daerah. Kewajiban ini merupakan salah satu bukti tertulis akan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Pada perkembangannya, amanat ini dikuatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang memperluas tujuan pelaporan sebagai salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bebas serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalamnya, akuntabilitas kinerja menjadi bagian dari delapan area perubahan yang menjadi fokus dari reformasi birokrasi. Selain itu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ditetapkan dan mempertegas urgensi pertanggungjawaban pencapaian kinerja terutama sebagai penggambaran upaya dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 merupakan upaya dalam memenuhi amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana di atas. Namun tidak hanya itu, pelaporan ini juga merupakan media penyampaian informasi pencapaian kinerja



sebagai bentuk pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor kepada para stakeholder. Sehingga, sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dapat dinyatakan berhasil atau tidak berhasil dicapai. Pernyataan tersebut bermanfaat bagi stakeholder untuk melihat posisi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dimaksudkan sebagai penyampaian pertanggungjawaban pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2025. Adapun tujuan dari penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 adalah sebagai penyajian ketercapaian sasaran dan target kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025, penggambaran upaya yang dilakukan untuk pencapaian kinerja, efisiensi pemanfaatan anggaran, serta sebagai evaluasi bagi perbaikan perencanaan kinerja di masa datang.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

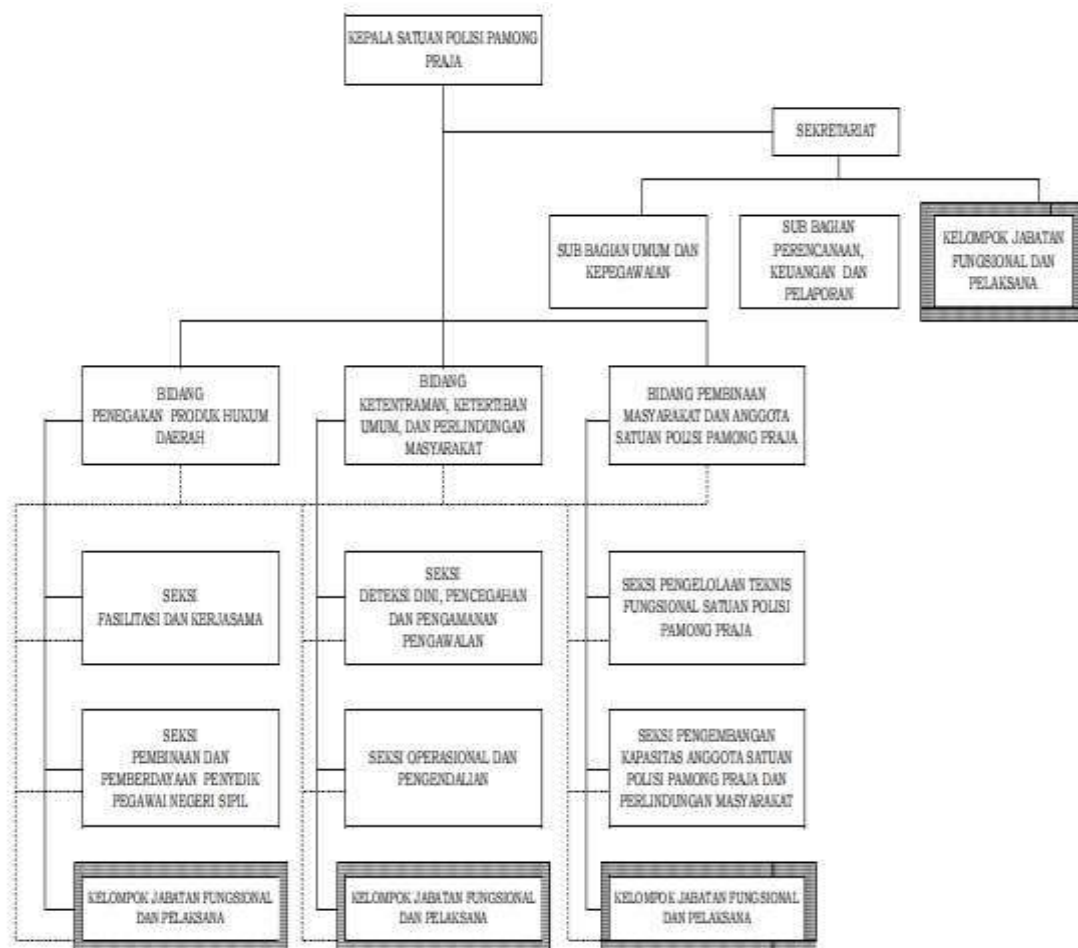
1.3.1. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Wali Kota yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas menegakkan Pereturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana Peraturan Walikota Nomor 141 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor disajikan dalam gambar sebagai berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor



Susunan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor terdiri dari :

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat membawahkan
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- c. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat membawahkan :
 1. Seksi Deteksi Dini, Pencegahan dan Pengamanan Pengawalan
 2. Seksi Operasional dan Pengendalian
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- d. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- e. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah membawahkan :
 1. Seksi Fasilitasi dan Kerjasama
 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana



1.3.2 Data Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

Dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perda dan perkada, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor didukung dengan sumber daya yang berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor memiliki sumber daya aparatur sebanyak 316 orang pegawai, terdiri atas 207 orang ASN/P3K Penuh Waktu, 109 orang P3K Paruh Waktu.

Tabel 1.1
Komposisi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

No	Satpol PP	Data Pol PP		Pendidikan						Kepangkatan				Jabatan				
		ASN/P3K Penuh Waktu	P3K Paruh Waktu	S2	S1	D3/D2/D1	SLT A	SLTP	SD	I	II	III	IV	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFU	Fungsional Satpol PP
1	Laki-laki	198	99	6	58	14	214	4	1	-	57	116	5	1	3	6	9	160
2	Perempuan	9	10	2	4	3	10	-	-	-	-	3	1	-	1	2	-	-
		207	109	8	62	3	224	4	1	-	57	119	6	1	4	8	9	160
Jumlah Keseluruhan 316																		

Sumber : Satpol PP Kota Bogor Tahun 2025



1.3.3 Cascading Kinerja

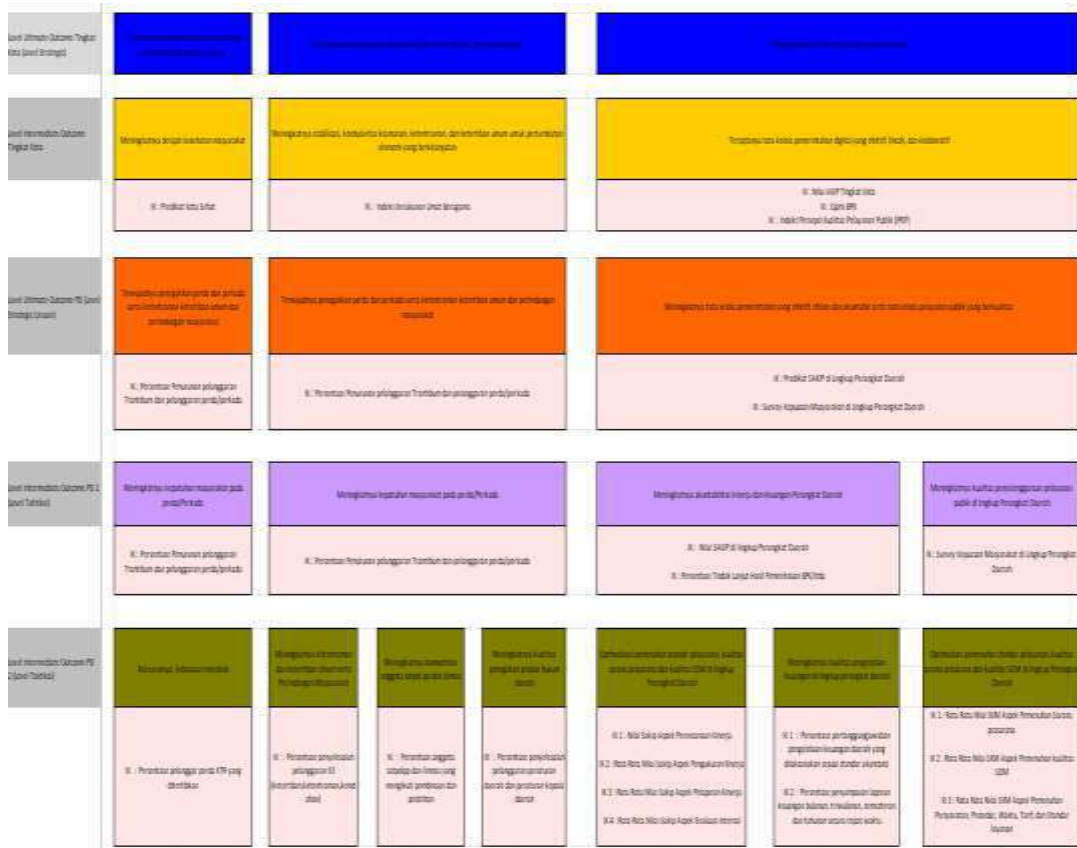
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, penjenjangan Kinerja didefinisikan sebagai suatu proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai.

Penjenjangan Kinerja perlu dirumuskan untuk :

1. Menyelaraskan kinerja organisasi kepada kinerja unit dan kinerja individu
2. Penilaian kinerja organisasi, unit kerja, dan individu
3. Penetapan program dan kegiatan secara fokus dan tepat
4. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien
5. Penataan struktur organisasi

Untuk memastikan organisasi bergerak berorientasi pada kinerja maka diperlukan instrumen berupa pohon kinerja yang akan mengawal logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk memastikan Tujuan dan Sasaran Renstra Satpol PP Tahun 2025-2026 dapat dikawal pencapaiannya maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor menyusun skema cascading kinerja sebagai berikut :

Gambar 1.2
Cascading Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor



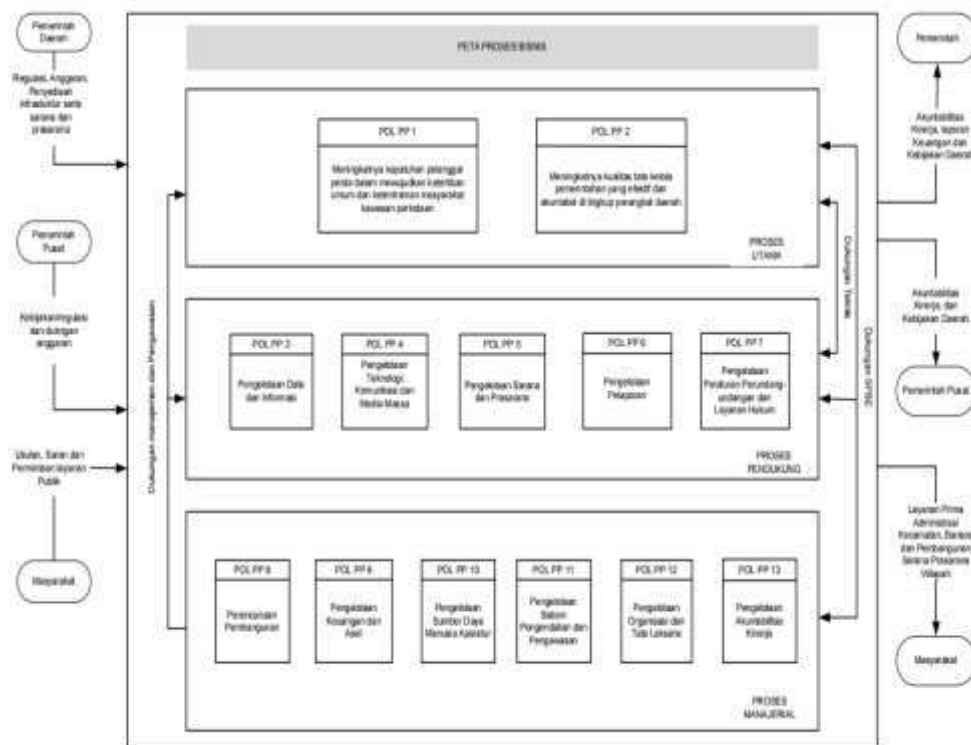
Sumber : Satpol PP Kota Bogor Tahun 2025

1.3.4 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis merupakan diagram yang menggambarkan hubungan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penyusunan Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi. Demi terwujudnya hubungan kinerja yang efektif dan efisien maka telah ditetapkan Keputusan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Nomor 800/09 Tahun 2024 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Gambar 1.3
Peta Proses Bisnis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor



Sumber : Satpol PP Kota Bogor Tahun 2024

1.3.5 Aspek Strategis Organisasi

Memperhatikan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025-2026, dan memperhatikan fungsi dan kewenangan Satpol PP untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar khususnya di bidang ketertarikan dan ketertiban umum, maka Renstra Satpol PP Tahun 2025-2026 ditetapkan untuk mendukung tujuan ke-1, tujuan ke-2 dan tujuan ke-4 RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026.

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Adapun Isu Strategis yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor yakni :

Tabel 1.2
Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

No	Isu Strategis	Masalah	Akar Masalah
1	Tuntutan Terwujudnya penegakkan perda dan perkara serta ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Belum optimalnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Sarana dan prasarana penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum belum sepenuhnya sesuai dengan standar pelayanan minimal
			Kapasitas sumber daya anggota Satpol PP dan Sat linmas belum optimal
		Rendahnya pemahaman masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban umum	Belum optimalnya peran serta masyarakat dan perlunya sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Terhadap Isu strategis tersebut dan untuk mendukung tujuan ke-1, tujuan ke-2 dan tujuan ke-4 RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026. Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dalam dua tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 1.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya penegakkan perda dan perkara serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada	Meningkatkan upaya pre-emptif, preventif dan persuasif atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah
				Peningkatan koordinasi dengan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait
			Meningkatkan kesadaran masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peningkatan sosialisasi dan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
			Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan Stakeholders penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota lain di daerah perbatasan
			Meningkatkan sinergitas Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan pembinaan dan kemampuan anggota satuan perlindungan masyarakat



			Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dan Penyidik PNS	Peningkatan kualitas penyidik PNS
				Peningkatan kualitas teknis anggota Satpol PP
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
2	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan Satpol PP
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Dan mengoptimalkan kinerja pengawasan internal	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja pengawasan internal

1.3.6 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 yang menilai akuntabilitas kinerja tahun 2025 berdasarkan Surat Nomor : 700/16/VII-LHE/2025/Itda Tanggal 4 Juli Tahun 2025, terdapat 6 rekomendasi yang seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Adapun rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Rekomendasi dan Tindak Lanjut

No	Komponen Yang Dinilai	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Melakukan revidi atas rencana aksi serta langkah-langkah pasti untuk mewujudkan hasil yang baik	Melaksanakan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja
2	Pengukuran Kinerja	Melakukan monitoring atas capaian kinerja secara berjenjang dan melakukan evaluasi atas capaian kinerja mulai dari sub kegiatan sampai dengan capaian kinerja organisasi	Melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berjenjang dan melakukan evaluasi atas capaian kinerja mulai dari sub kegiatan sampai dengan capaian kinerja organisasi
		Meriviu kembali rencana aksi yang disusun, dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung dengan kegiatan-kegiatan/aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut	Melaksanakan revidi rencana aksi
3	Pelaporan Kinerja	Melakukan revidi indikator kinerja yang tidak dapat dibandingkan realisasi kinerjanya (benchmark kinerja) di tingkat provinsi, nasional maupun internasional	Melaksanakan revidi indikator kinerja
		Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 dan menjabarkan lebih dalam analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja	Perbaiki dokumen LKIP dengan menjabarkan lebih dalam analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam pencapaian kinerja pada dokumen LKIP selanjutnya
4	Akuntabilitas Kinerja Internal	Melakukan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	Melaksanakan monitoring atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN

Dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar sejalan dengan rencana pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perumusan tujuan dan sasaran pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Berbeda dengan periode 2025-2026, sesuai dengan Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 yang menyebabkan adanya perbedaan pendekatan perumusan tujuan dan sasaran karena tidak adanya visi dan misi Kepala Daerah.

Untuk tetap menjaga keselarasan dengan dokumen yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJPD Kota Bogor Tahun 2005-2025 yang merupakan tahap usaha peningkatan berkelanjutan. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Bogor tersebut ditujukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan dalam RPJPD.

2.1.1 Visi dan Misi RPJPD 2005-2025

Visi Pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kota Bogor 2005-2025 adalah :

” Kota Jasa Yang Nyaman Dengan Masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah ”.

Untuk mewujudkan visi tersebut Pemerintah Kota Bogor, telah menetapkan 4 misi, yakni :

- Misi Pertama : Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada;
- Misi Kedua : Mewujudkan Kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera;
- Misi Keempat : Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Visi dan Misi dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam tabel RPD Tahun 2025-2026 Kota Bogor dan berkaitan dengan kewenangan Satpol PP untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar khususnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bogor 2025 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja	
				2025	2026
Tujuan 1 : Terwujudnya pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Sasaran 1.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Predikat Kota Sehat	Swastisa ba Wistara (Kategori Tertinggi)	Swastisa ba Wistara (Kategori Tertinggi)	Swastisa ba Wistara (Kategori Tertinggi)
Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan	Sasaran 2.4 : Meningkatnya stabilisasi, kondusivitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	79,16	79,31	79,36
Tujuan 4 : Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Sasaran 4.1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif	Nilai SAKIP Tingkat Kota	BB	A	A
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP
		Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	97,23	98	98,50

2.1.2 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025-2026 harus memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kota Tahun 2025-2026 dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan daerah. Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator



Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	
			2025	2026
Terwujudnya penegakkan perda dan perkara serta ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada	Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	9,2%	10,9%
		Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	88,75	89,60
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95%	95%
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	≥ 1 Inovasi/tahun/ PD	≥ 1 Inovasi/tahun/ PD
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	91%	92%
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	89,80	89,90





2.1.3 Strategi, kebijakan dan Program

Sesuai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, berikut ini adalah strategi, kebijakan dan program diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Strategi, Kebijakan dan Program

Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatkan upaya pre-emptif, preventif dan persuasif atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah Peningkatan koordinasi dengan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal terkait	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatkan kesadaran masyarakat, badan hukum dan aparaturnya terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peningkatan sosialisasi dan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	
Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan stakeholders penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota lain di daerah perbatasan	
Meningkatkan sinergitas Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan pembinaan dan kemampuan anggota satuan perlindungan masyarakat	
Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dan Penyidik PNS	Peningkatan kualitas penyidik PNS	
	Peningkatan kualitas teknis anggota Satpol PP	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	
Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja pengawasan internal	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	





2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Bogor Tahun 2025 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026, Renstra, dan IKU Satpol PP Kota Bogor. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Satpol PP Kota Bogor untuk mencapainya pada Tahun 2025. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Bogor

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Awal	Perubahan
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada	Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	9,2%	2,2%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	88,75	87,45
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95%	95%
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	≥ 1 Inovasi/tahun/PD	≥ 1 Inovasi/tahun/PD
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	91%	100%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	89,80	92,75



Secara umum penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dapat dibagi menjadi tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan. Tugas umum pemerintahan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan ketatausahaan, pelayanan aparatur dan penataan sarana dan prasarana kerja, sedangkan tugas pembangunan diwujudkan dalam program pembangunan yang dilaksanakan tahun 2025, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum

a. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
- Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada



- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 48.463.151.027,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi dan Belanja Modal. Secara rinci Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :





Tabel 2.5
Rencana Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Rencana (Rp.)	Komposisi (%)
5			Belanja		
5	1		Belanja Operasi	48.312.316.327	99.6%
5	1	01	Belanja Pegawai	38.220.620.285	78.8%
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	10.091.696.042	20.8%
5	2		Belanja Modal	150.834.700	0.003%
5	2	02	Belanja Peralatan dan Mesin	150.834.700	0.003%
Jumlah Belanja				48.463.151.027	100%

Dari keseluruhan pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, anggaran seluruhnya dialokasikan pada belanja operasional dengan belanja pegawai sebanyak 78,8%, belanja barang dan jasa sebanyak 20,8% dan belanja modal 0,003%.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bogor. Akuntabilitas adalah suatu alat untuk memberi informasi kepada publik, melalui proses yang berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Visi, Misi dan Rencana Strategisnya.

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sebagai pelaksana Misi Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan rencana strategis untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan suatu indikator kinerja tertentu, sehingga dapat memberikan informasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan kepada publik.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan analisa Akuntabilitas Kinerja dalam rangka mengevaluasi berjalan, atau tidak berjalannya program dari pada Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Pemerintah Kota Bogor .

3.1 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008



tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$5 \leq 50\%$	Sangat Rendah

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada tahun 2025 diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Sebanyak 6 (enam) indikator telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang mencerminkan keberhasilan maupun kegagalan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor. Pada tahun 2025, 4 (empat) indikator tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dan sebanyak 2 (dua) indikator tidak mencapai target. Berikut adalah rincian realisasi per indikator :



Tabel 3.2.
Realisasi IKU Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target Tahun 2025		Realisasi	Capaian	Kriteria
			Awal	Perubahan			
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat Pada Perda/Perkada	Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	9,2%	2,2%	56,8%	2581%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	88,75	87,45	87,45	100%	Sangat Tinggi
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	95%	95%	88,2%	92,88%	Sangat Tinggi
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	≥ 1 Inovasi/tahun/ PD	≥ 1 Inovasi/tahun/ PD	0	0	Sangat Rendah
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	91%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	89,80	92,75	92,84	100,10%	Sangat Tinggi



SASARAN STRATEGIS I

MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT PADA PERDA/PERKADA

① Persentase Penurunan Pelanggar Trantibum dan Pelanggaran Perda/Perkada

Sasaran Strategis Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Pada Perda/Perkada dengan indikator persentase penurunan pelanggar trantibum dan pelanggaran perda/perkada dengan capaian 2581% dari target 2,2% dengan realisasi sebesar 56,8%.

Sasaran strategis Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Pada Perda/Perkada menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025. Sasaran strategis ini diukur oleh indikator persentase penurunan pelanggar trantibum dan pelanggaran perda/perkada, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target dan Realisasi Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Pada Perda/Perkada dengan indikator persentase penurunan pelanggar trantibum dan pelanggaran perda/perkada pada tahun 2025 dengan target 2,2% dan realisasi mencapai 56,8%, sehingga capaiannya sebesar 2581%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

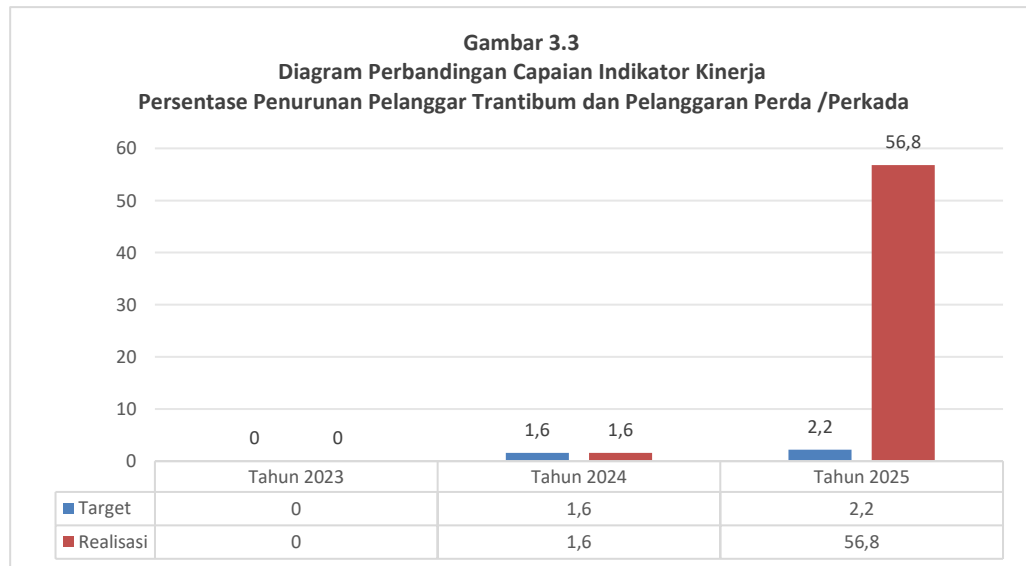
Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dijelaskan dalam gambar berikut :



Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, Persentase penurunan pelanggar trantibum dan pelanggaran perda/perkada memiliki target 1,6% dan terealisasi 1,6%, sehingga capaiannya 100%. Dibandingkan dengan tahun 2025, maka terjadi perbedaan realisasi yang signifikan penurunan pelanggar trantibum dan pelanggaran perda/perkada dengan target 2,2% dan terealisasi 56,8% dan capaiannya 2581% .

Jumlah pelanggar trantibum dan pelanggaran perda dan perkara pada tahun 2024 sebanyak 8805 pelanggar, sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 3798 pelanggar.

Perbandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 tidak dapat dianalisis karena indikator sasaran tersebut tidak ada di Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2025-2026, namun pada tahun 2024 dapat digambarkan bahwa realisasi penurunan pelanggar trantibum dan pelanggaran perda/perkada sesuai target 1,6% menjadi 1,6% dan capaiannya 100%.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dijelaskan dalam gambar berikut :



Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode Renstra. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dijelaskan bahwa capaian tahun 2025 telah mencapai target pada akhir Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kota, Provinsi dan Nasional

Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Kota, Provinsi dan Nasional tidak bisa dianalisis karena perbedaan Indikator Kinerja antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dengan Kota, Provinsi maupun Nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan pada Tahun 2025



Faktor penyebab keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 dijelaskan dalam gambar berikut :

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian persentase penurunan pelanggaran trantibum dan pelanggaran perda/perkada yaitu dengan menurunnya kebiasaan merokok ditandai dengan pelanggaran Perda KTR mencapai 100%.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan persentase penurunan pelanggaran trantibum dan pelanggaran perda/perkada antara lain Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah dan Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian persentase penurunan pelanggaran trantibum dan pelanggaran perda/perkada yaitu dengan meningkatnya ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ditandai dengan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan) mencapai 100%.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan persentase penurunan pelanggaran trantibum dan pelanggaran perda/perkada antara lain pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/kota, pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan dan Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum.

Faktor lainnya yang mendukung pencapaian persentase penurunan pelanggaran trantibum dan pelanggaran perda/perkada yaitu dengan meningkatnya kompetensi anggota Satpol PP dan Linmas ditandai dengan Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan mencapai 100%.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan antara lain peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Faktor lainnya yang mendukung pencapaian persentase penurunan pelanggaran trantibum dan pelanggaran perda/perkada yaitu dengan meningkatnya penegakan produk hukum daerah ditandai dengan Persentase penegakan perda mencapai 100%.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan antara lain melaksanakan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, melaksanakan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala daerah serta Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Target kinerja di tahun 2025 dengan capaian 2581% didukung oleh peran serta dan partisipasi aktif dari bidang-bidang sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitong dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan. Serta komitmen dari seluruh pegawai untuk melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dengan menerapkan budaya kerja yang berlaku di Satuan Polisi Pamong Praja.

Alternatif solusi atau inovasi yang dilakukan adalah dengan membentuk kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing bidang dalam menyelesaikan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi maupun berpotensi akan terjadi.

6. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Penurunan Pelanggar Trantibum dan Pelanggaran Perda/Perkada

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat pada Perda/Perkada dengan indikator Persentase penurunan pelanggar trantibum dan pelanggaran perda/perkada didukung oleh program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota, kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota.

Tabel 3.3
Program kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada	Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.4
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada	Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada	2581%	86,6%	13,4 %

Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 13,4 % yaitu sebesar Rp. 385.173.747,- dari pagu anggaran yang tersedia Rp. 2.868.760.929,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 2.483.587.182,- dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator Persentase pelanggaran perda yang ditertibkan.

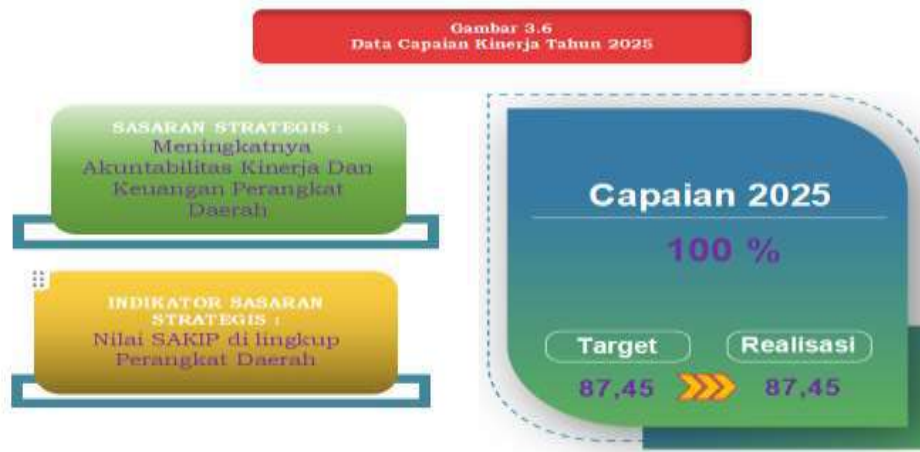
SASARAN STRATEGIS II

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

① Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah

Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator yang pertama yaitu Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah dengan capaian 100% dari target 87,45 dengan realisasi sebesar 87,45.

Sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025. Sasaran strategis ini diukur oleh indikator Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target dan Realisasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah pada tahun 2025 dengan target 87,45 dan realisasi mencapai 87,45 sehingga capaiannya sebesar 100%.

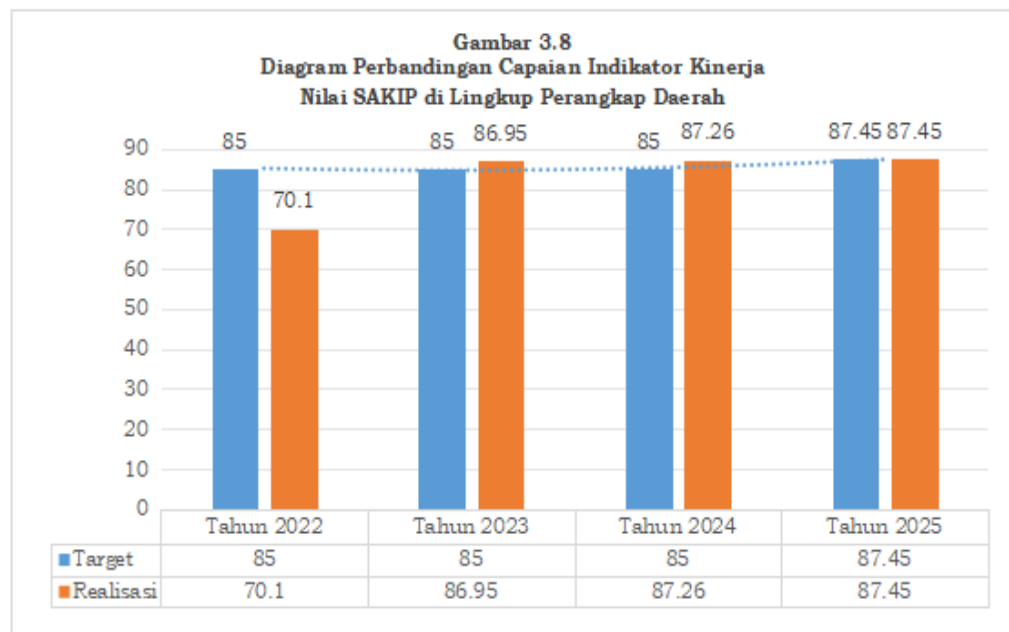
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dijelaskan dalam gambar berikut :



Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah memiliki target A (87,45) dan terealisasi A (87,45), sehingga capaiannya 100%. Dibandingkan dengan tahun 2025, maka terjadi kesamaan realisasi Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah dengan target A (87,45) dan terealisasi A (87,45) dan capaiannya 100% .

Perbandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 dan 2023 dapat digambarkan bahwa realisasi dan pencapaian Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dijelaskan dalam gambar berikut :



Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode Renstra. Berdasarkan gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa indikator Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah pada tahun 2025 capaiannya 100% yakni A (87,45) dari target A (87,45) artinya mencapai target pada akhir Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kota, Provinsi dan Nasional

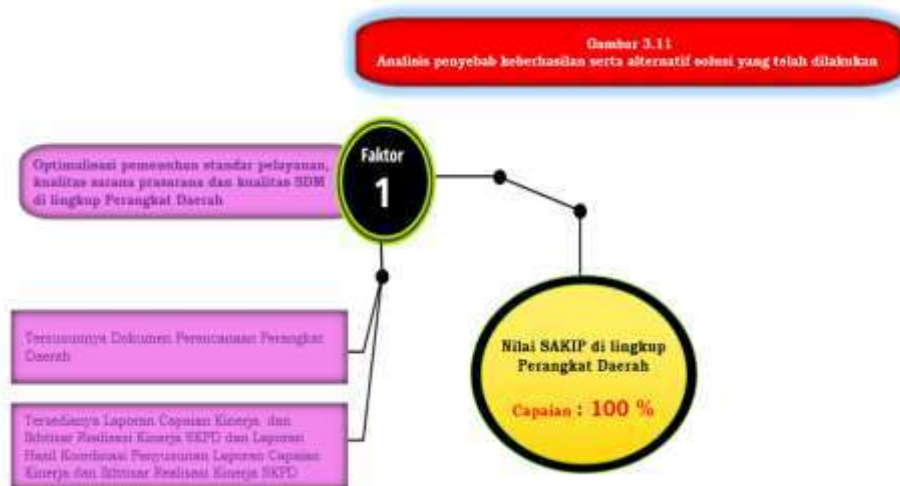
Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Kota, Provinsi dan Nasional dijelaskan dalam gambar berikut :



Pada gambar 3.10 diatas dijelaskan Perbandingan realisasi kinerja antara Nilai SAKIP Satpol PP pada tahun 2025 yang capaiannya 100% dengan nilai A (87,45) dari target A (87,45), lebih tinggi dari capaian rata-rata Kota yaitu BB (78,96), capaian rata-rata Provinsi dengan nilai B (69,05) dan capaian rata-rata Nasional dengan nilai B (66,45).

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan pada Tahun 2025

Faktor penyebab keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 dijelaskan dalam gambar berikut :



Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah yaitu dengan meningkatnya optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah ditandai Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja dengan nilai 26,70, Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja dengan nilai 25,20, Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja dengan nilai 13,80, Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal 21,75 atau mencapai 100%.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah antara lain terpenuhinya dokumen perencanaan yaitu renja, renja perubahan dan renstra perangkat daerah serta terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhitisar realisasi perangkat daerah secara tepat waktu.

Target kinerja di tahun 2025 dengan capaian 100% didukung oleh peran serta dan partisipasi aktif dari bidang-bidang sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitong dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan. Serta komitmen dari seluruh pegawai untuk melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dengan menerapkan budaya kerja yang berlaku di Satuan Polisi Pamong Praja.

Alternatif solusi atau inovasi yang dilakukan adalah dengan membentuk kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing bidang dalam menyelesaikan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi maupun berpotensi akan terjadi.

6. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan indikator Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan kegiatan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.5
Program kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran, berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.6
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah	100%	93 %	7%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 7 % yaitu sebesar Rp. 3.176.056.975,- dari pagu anggaran yang tersedia Rp. 45.594.390.098,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 42.418.333.123,- dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator Nilai SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah.

② Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator yang kedua yaitu Kepatuhan Pengelolaan Keuangan dengan capaian 92,8% dari target 95% dengan realisasi sebesar 88,2%.

Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025. Sasaran strategis ini diukur oleh indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target dan Realisasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan pada tahun 2025 dengan target 95% dan realisasi mencapai 88,2% sehingga capaiannya sebesar 92,8%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dijelaskan dalam gambar berikut :



Perbandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak dapat dianalisis karena indikator sasaran tersebut tidak ada di Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025-2026.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dijelaskan dalam gambar berikut :



Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode Renstra. Berdasarkan gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan pada tahun 2025 capaiannya 92,8% dari target 95% artinya belum mencapai target pada akhir Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kota, Provinsi dan Nasional

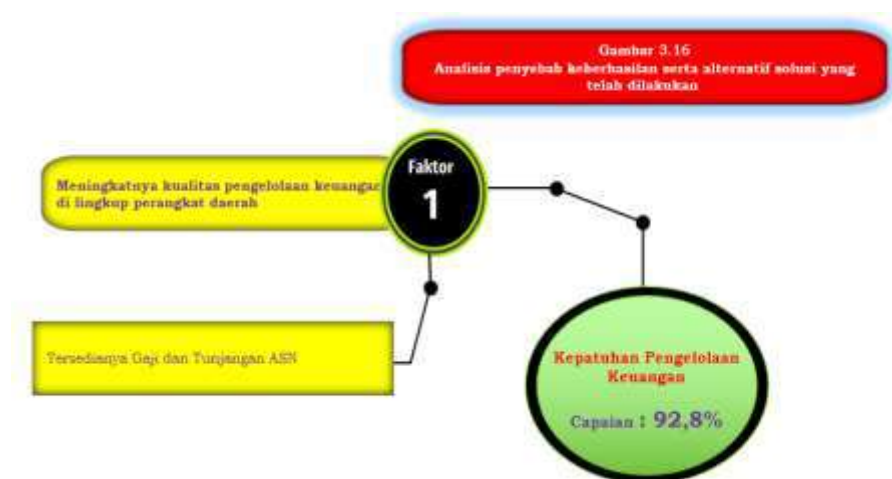
Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Kota, Provinsi dan Nasional dijelaskan dalam gambar berikut :



Pada gambar 3.15 diatas dijelaskan perbandingan realisasi kinerja antara Kepatuhan Pengelolaan Keuangan Satpol PP pada tahun 2025 yang capaiannya 92,8%. Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Kota, Provinsi dan Nasional tidak bisa dianalisis karena perbedaan Indikator Kinerja antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dengan Kota, Provinsi maupun Nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan pada Tahun 2025

Faktor penyebab keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 dijelaskan dalam gambar berikut :



Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Keuangan yaitu dengan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah ditandai Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu dengan nilai 89,47%, Persentase pengelolaan BMD di lingkup perangkat daerah dengan nilai 95,75, Persentase Kepatuhan Anggaran dengan nilai 65%, Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA

mencapai 92,65%, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai 98,33%.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan antara lain tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

Target kinerja di tahun 2025 dengan capaian 92,8% didukung oleh peran serta dan partisipasi aktif dari bidang-bidang sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitong dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan.

6. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kepatuhan Pengelolaan Keuangan

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.

Tabel 3.7
Program kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi

penggunaan sumber daya anggaran, berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.8
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	92,8%	93 %	7%

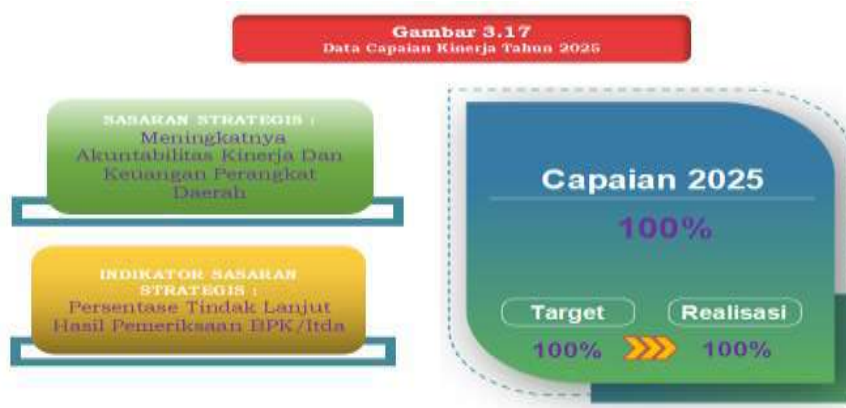
Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 7 % yaitu sebesar Rp. 3.176.056.975,- dari pagu anggaran yang tersedia Rp. 45.594.390.098,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 42.418.333.123,- dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator Kepatuhan Pengelolaan Keuangan.

③ Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita

Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator yang ketiga yaitu Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Ita dengan capaian 100% dari target 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025. Sasaran strategis ini diukur oleh indikator

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target dan Realisasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida pada tahun 2025 dengan target 100% dan realisasi mencapai 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dijelaskan dalam gambar berikut :



Perbandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022, 2023 dan 2024 tidak dapat dianalisis karena indikator sasaran tersebut tidak ada di Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025-2026.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dijelaskan dalam gambar berikut :



Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode Renstra. Berdasarkan gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida pada tahun 2025 capaiannya 100% dari target 100% artinya mencapai target pada akhir Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kota, Provinsi dan Nasional

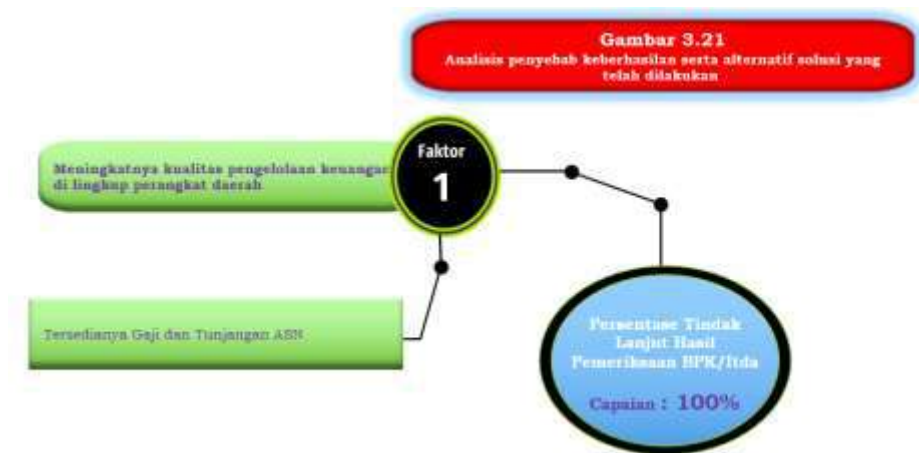
Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Kota, Provinsi dan Nasional dijelaskan dalam gambar berikut :



Pada gambar 3.20 diatas dijelaskan perbandingan realisasi kinerja antara Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda pada tahun 2025 yang capaiannya 100%. Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Kota, Provinsi dan Nasional tidak bisa dianalisis karena perbedaan Indikator Kinerja antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dengan Kota, Provinsi maupun Nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan pada Tahun 2025

Faktor penyebab keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 dijelaskan dalam gambar berikut :



Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida yaitu dengan meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan di lingkup perangkat daerah ditandai Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu dengan nilai 89,47%, Persentase pengelolaan BMD di lingkup perangkat daerah dengan nilai 95,75, Persentase Kepatuhan Anggaran dengan nilai 65%, Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA mencapai 92,65%, Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai 98,33%.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida antara lain tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.

Target kinerja di tahun 2025 dengan capaian 100% didukung oleh peran serta dan partisipasi aktif dari bidang-bidang sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitong dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan.



6. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah.

Tabel 3.9
Program kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran, berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida	92,8%	93 %	7%



Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 7 % yaitu sebesar Rp. 3.176.056.975,- dari pagu anggaran yang tersedia Rp. 45.594.390.098,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 42.418.333.123,- dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida.

④ Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)

Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator yang keempat yaitu Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100) dengan capaian 0% dari target ≥ 1 Inovasi/tahun/PD dengan realisasi sebesar ≥ 0 Inovasi/tahun/PD.

Pada tahun 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tidak berhasil mencapai target indikator jumlah inovasi perangkat Daerah dengan tingkat kematangan inovasi > 100. Dari 1 (satu) inovasi yang diajukan untuk dinilai, mendapat nilai kematangan kurang dari 100, sebagaimana ditampilkan dalam tabel dan gambar berikut :

Tabel 3.11
Rapor Nilai Kematangan Indeks Inovasi Daerah Satpol PP Tahun 2025

No	Nama Instansi	Nama Inovasi	Nilai Kematangan
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor	SKUTER (Sekolahku Tertib)	25



1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target dan Realisasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100) pada tahun 2025 dengan target ≥ 1 Inovasi/tahun/PD dan realisasi mencapai ≥ 0 Inovasi/tahun/PD sehingga capaiannya sebesar 0%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dijelaskan dalam gambar berikut :



Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100) memiliki target ≥ 1 Inovasi/tahun/PD dan terealisasi ≥ 1 Inovasi/tahun/PD, sehingga capaiannya 100%. Dibandingkan dengan tahun 2025, maka terjadi penurunan Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100) dengan target ≥ 1 Inovasi/tahun/PD dan terealisasi ≥ 0 Inovasi/tahun/PD dan capaiannya 0% .

Perbandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 dan 2023 tidak dapat dianalisis, pencapaian Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100) mengalami penurunnya di setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dijelaskan dalam gambar berikut :



Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode Renstra. Berdasarkan gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa indikator Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100) pada tahun 2025 capaiannya 0% dari target ≥ 1 Inovasi/tahun/PD artinya tidak mencapai target pada akhir Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kota, Provinsi dan Nasional

Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Kota, Provinsi dan Nasional dijelaskan dalam gambar berikut :



Pada gambar 3.25 diatas dijelaskan perbandingan realisasi kinerja antara Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100) pada tahun 2025 yang capaiannya 0%. Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Kota, Provinsi dan Nasional tidak bisa dianalisis karena perbedaan Indikator



Kinerja antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dengan Kota, Provinsi maupun Nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan pada Tahun 2025

Faktor yang menghambat pencapaian kinerja indikator jumlah inovasi perangkat Daerah dengan tingkat kematangan inovasi > 100, sebagai berikut :

- a. Inovasi yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor belum didukung dengan persyaratan administrasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Dan Atau Insentif Inovasi Daerah yaitu sebagai berikut :
 - ☒ Regulasi Inovasi Daerah, SKUTER (Sekolahku Tertib) hanya berupa Surat Keputusan Sekretaris Daerah tidak didukung dengan Peraturan Daerah
 - ☒ Dukungan Anggaran, tidak adanya anggaran yang dialokasikan penerapan inovasi
 - ☒ Integrasi Program dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD, Inovasi baru masuk sebagai indikator pada Renstra Tahun 2025-2026 namun tidak dimasukkan dalam program inovasi daerah secara khusus
 - ☒ Jejaring Inovasi, belum melibatkan perangkat daerah lainnya
 - ☒ Kualitas Inovasi Daerah, Tidak ada penjaringan dan pemilihan ide
- b. Kurangnya pemahaman tentang indikator penilaian inovasi daerah sehingga eviden yang dibutuhkan tidak lengkap atau dokumen yang dibutuhkan tidak diupload.



Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator jumlah inovasi perangkat Daerah dengan tingkat kematangan inovasi > 100, sebagai berikut :

- a. Melengkapi regulasi inovasi daerah dalam bentuk Peraturan Wali Kota dan atau Peraturan Kepala Daerah tentang Inovasi Daerah yang didalamnya mengatur sistem inovasi daerah, tahapan pengembangan, pembinaan, dan evaluasi serta menetapkan inovasi prioritas daerah.
- b. Dukungan SDM terhadap inovasi daerah
- c. Integrasi program dan kegiatan di tahun mendatang

Indikator jumlah inovasi perangkat Daerah dengan tingkat kematangan inovasi > 100 tidak didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan secara khusus sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya.

SASARAN STRATEGIS III

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUP PERANGKAT DAERAH

① Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah

Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup perangkat daerah dengan indikator yaitu Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah dengan capaian 100,1% dari target 92,75 dengan realisasi sebesar 92,84, menandakan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan yang diberikan di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2025 dikategorikan “SANGAT BAIK” dan penerima layanan merasa puas dengan layanan yang diberikan.

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup perangkat daerah menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025. Sasaran strategis ini diukur oleh indikator Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target dan Realisasi Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup perangkat daerah dengan indikator Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah pada tahun 2025 dengan target 92,75 dan realisasi mencapai 92,84 sehingga capaiannya sebesar 100,1%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 dan beberapa tahun terakhir dijelaskan dalam gambar berikut :



Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024, Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah memiliki target 87,50 dan terealisasi 92,50, dan capaiannya 105%. Dibandingkan dengan tahun 2025, terjadi perbedaan realisasi Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah dengan target 92,75 dan terealisasi 92,84 dan capaiannya 100,1%.

Perbandingan kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2022 dan 2023 dapat digambarkan bahwa realisasi dan pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dijelaskan dalam gambar berikut :



Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode renstra, analisis atas capaian kinerja juga membandingkan capaian indikator kinerja sasaran strategis dengan rencana pencapaian akhir periode Renstra. Berdasarkan gambar diatas maka dapat dijelaskan bahwa indikator Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah pada tahun 2025 capaiannya 100,1% dari target 92,75 dan realisasinya 92,84 artinya mencapai target pada akhir Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Kota, Provinsi dan Nasional

Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Kota, Provinsi dan Nasional dijelaskan dalam gambar berikut :

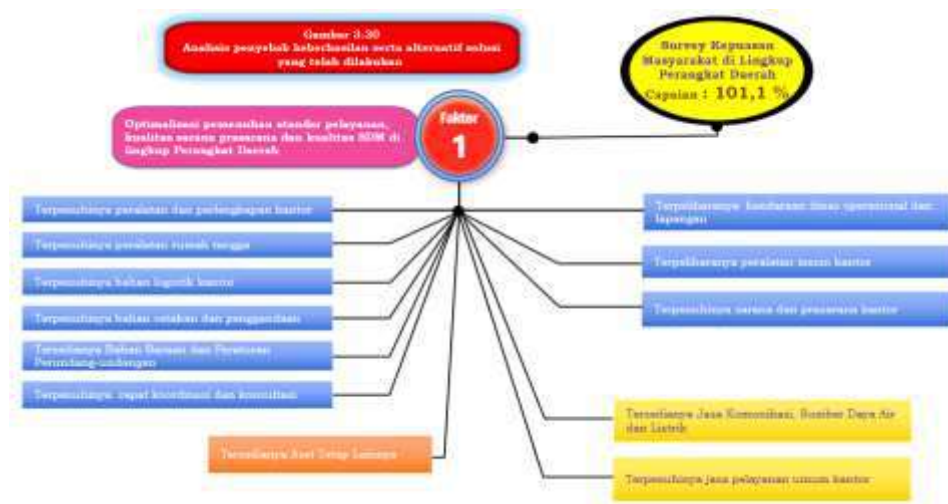


Pada gambar 3.29 diatas dijelaskan Perbandingan realisasi kinerja antara Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah pada tahun 2025 yang capaiannya 100,1% dengan nilai 92,84 dari target 92,75, lebih tinggi dari capaian rata-rata Kota yaitu 92,52.

Untuk perbandingan realisasi kinerja dengan Provinsi dan Nasional tidak bisa dianalisis karena perbedaan Indikator Kinerja antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor dengan Provinsi maupun Nasional.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan pada Tahun 2025

Faktor penyebab keberhasilan dan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 dijelaskan dalam gambar berikut :



Faktor keberhasilan yang mendukung pencapaian Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah yaitu dengan Optimalisasi pemenuhan standar pelayanan, kualitas sarana prasarana dan kualitas SDM di lingkup Perangkat Daerah ditandai Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana nilai 91,92, Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM nilai 93,03, Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan nilai 94,99, Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan mencapai 91,92.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan antara lain terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor, terpenuhinya peralatan rumah tangga, terpenuhinya bahan logistik kantor, terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan, terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi, terpenuhinya aset tetap lainnya, terpenuhinya komunikasi, sumber daya air listrik, terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor, terpeliharanya kendaraan dinas operasional dan lapangan, terpeliharanya peralatan mesin kantor dan terpenuhinya sarana dan prasarana kantor .

Target kinerja di tahun 2025 dengan capaian 101,1% didukung oleh peran serta dan partisipasi aktif dari bidang-bidang sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitong dan evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan. Serta komitmen dari seluruh pegawai untuk melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dengan menerapkan budaya kerja yang berlaku di Satuan Polisi Pamong Praja.

Alternatif solusi atau inovasi yang dilakukan adalah dengan membentuk kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing bidang dalam menyelesaikan dan mengantisipasi permasalahan yang terjadi maupun berpotensi akan terjadi.

6. Analisis program yang menunjang keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan indikator Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah didukung oleh program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tabel 3.12
Program kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

7. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran, berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.13
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	92,8%	93 %	7%



Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran sebesar 7 % yaitu sebesar Rp. 3.176.056.975,- dari pagu anggaran yang tersedia Rp. 45.594.390.098,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 42.418.333.123,- dalam pelaksanaan program dan kegiatan terhadap pencapaian indikator Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor mengalokasikan sebesar Rp. 48.463.151.027,- terealisasi sebesar Rp. 44.901.920.305,- sehingga persentase serapan anggaran mencapai 92,7 %. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran pada setiap sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
			Rp	%
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada	2.868.760.929	2.483.587.182	86,6%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	45.594.390.098	42.418.333.123	93%
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah			
Jumlah		48.463.151.027,-	44.901.920.305,-	92,7%





Adapun Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada perda/Perkada	Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada	2,2%	56,8%	2581%	2.868.760.929	2.483.587.182	86,6%
Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggar perda KTR yang ditertibkan	100%	100%	100%	2.868.760.929	2.483.587.182	86,6%	
	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,ketentraman,kei ndahan)	100%	100%	100%				
	Persentase anggota satpolpp dan linmas yang mengikuti pembinaan dan pelatihan	100%	100%	100%				
	Persentase penyelesaian pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	100%	100%	100%				

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti dan terselesaikan	100%	100%	100%	1.732.843.200	1.594.378.835	92%
1.1	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	49.290.000	20.143.000	40,9%
1.2	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	28.000.000	20.100.000	71,8%

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1.3	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	104 Orang	104 Orang	100%	71.416.000	57.902.000	81,1%
1.4	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	307 Orang	260 Orang	85%	46.412.200	18.019.835	38,8%
1.5	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Laporan	12 Laporan	100%	128.745.000	106.246.000	82,5%

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1.6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	1.371.980.000	1.371.968.000	100%
1.7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	1 Laporan	100%	37.000.000	-	0

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
2	Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase tindaklanjut penegakan perda dan perkara	100%	100%	100%	1.128.769.729	882.096.347	78,1%
2.1	Sub Kegiatan : Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	3 Laporan	3 Laporan	100%	74.775.784	59.328.275	79,3%
2.2	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%	550.926.425	503.563.070	91,4%
2.3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	100%	499.067.820	315.225.002	63,2%

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
2.4	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100%	3.999.700	3.980.000	99,5%
3	Kegiatan : Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang dibina	100%	63,4%	63,4%	7.148.000	7.112.000	99,5%
3.1	Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	1 Laporan	100%	7.148.000	7.112.000	99,5%

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	87,45	87,45	100%	45.594.390.098	42.418.333.123	93%	
	Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	100%	88,24%	88,24%				
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	1	0	0%				
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	100%	100%	100%				
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	92,75	92,84	101,1%				

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	26,70	26,70	100%	45.594.390.098	42.418.333.123	93%	
	Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	25,20	25,20	100%				
	Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	13,80	13,80	100%				
	Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	21,75	21,75	100%				
	Persentase Realisasi Rencana Tindak Pengendalian Resiko di Lingkup Perangkat Daerah	100%	100%	100%				
	Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100%	89,47%	89,47%				
	Persentase pengelolaan BMD di lingkup perangkat daerah	94%	95,75%	102%				

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase Kepatuhan Anggaran	100%	65%	65%	45.594.390.098	42.418.333.123	93%	
	Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95%	92,65%	98%				
	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94%	98,33%	105%				
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	92,72	91,92	99%				
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	93,35	93,03	100%				
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	94,50	94,67	100%				
	Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	92,15	92,66	101%				

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Kegiatan : Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan yang tepat waktu	100%	100%	100%	19.999.800	18.696.000	93,5%
		Persentase ketercapaian target indikator sasaran renja perangkat daerah	100%	84,70%	84,70%			
		Persentase realisasi fisik kegiatan di lingkup perangkat daerah	100%	100%	100%			
		Persentase realisasi anggaran kegiatan di lingkup perangkat daerah	100%	92,65%	92,65%			

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1.1	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	7.999.800	7.489.600	93,6%
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	6 Laporan	100%	12.000.000	11.206.400	93,4%
2	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran terhadap DPA	100%	92,65%	92,65%	38.220.620.285	35.367.672.738	92,5%
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100%	89,47%	89,47%			

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja				Keuangan	
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
2.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200/12 Orang/Bulan	200/12 Orang/Bulan	100%	38.220.620.285	35.367.672.738	92,5%
3	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100%	100%	100%	669.572.567	664.448.876	99,2%
3.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	288.824.200	288.253.800	99,8%
3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	52.441.100	52.347.500	99,8%

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	22.500.000	22.500.000	100%
3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	228.313.904	227.514.000	99,6%
3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100%	40.953.363	38.330.000	93,6%
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%	36.540.000	35.503.576	97,2%

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
4	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	150.834.700	150.750.000	99,9%
4.1	Sub Kegiatan : Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	9 Unit	9 Unit	100%	150.834.700	150.750.000	99,9%
5	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	5.001.778.171	4.845.017.493	96,9%
5.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	219.875.155	113.835.295	51,8%
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%	4.781.903.016	4.731.182.198	98,9%

No	Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
6	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	100%	100%	1.531.584.575	1.498.656.030	97,9%
6.1	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	65 Unit	65 Unit	100%	1.440.842.203	1.408.778.030	97,8%
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	86 Unit	86 Unit	100%	60.850.372	60.028.000	98,6%
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	29.892.000	29.850.000	99,9%

3.3 ANALISIS EFISIENSI

Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 6 sasaran, terdapat 4 sasaran yang capaian kinerjanya sudah mencapai/melebihi target, dengan tingkat efisiensi anggaran sebagai berikut :

1. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada Perda/Perkada” tercapai melalui Kinerja sebagai berikut :
 - a. “Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran perda/perkada” sebesar 2581% atau kategori “Sangat tinggi” dengan efisiensi anggaran sebesar 13,4%.
2. Kinerja Sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah” tercapai melalui Kinerja sebagai berikut :
 - a. “Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah” sebesar 100% atau kategori “Sangat tinggi” dengan efisiensi anggaran sebesar 7%.
 - b. “Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda sebesar 100% atau kategori “Sangat tinggi” dengan efisiensi anggaran sebesar 7%.
3. Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah” tercapai melalui Kinerja sebagai berikut :
 - c. “Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah” sebesar 100,1`% atau kategori “Sangat tinggi” dengan efisiensi anggaran sebesar 7%.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance.

LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor selama tahun 2025. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Rencana Strategis 2025-2026 dan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi, dimana dasar dari pengukuran kinerja adalah Renstra 2025-2026 yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah 2025-2026. Renstra ini hanya digunakan pada tahun 2025 sehingga ada beberapa indikator yang perlu dimatangkan lagi baik dari segi narasi, cara perhitungan maupun target kinerja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor pada tahun 2025 cukup optimal dalam mencapai kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sasaran Rencana Strategis 2025-2026 sebesar 84,70%. Dari 6 IKU, sebanyak 4 IKU berhasil melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan antara lain didukung oleh peran serta dan partisipasi aktif dari bidang-bidang sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitong dan evaluasi terhadap program, kegiatan

dan sub kegiatan. Serta komitmen dari seluruh pegawai untuk melaksanakan kinerja dengan sebaik-baiknya.

Untuk lebih meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, pada tahun-tahun mendatang akan diupayakan menempuh berbagai strategi guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor tahun 2025, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum/ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan masyarakat, dan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Secara internal perlu adanya peningkatan kualitas koordinasi antar Bagian sehingga dapat integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dapat terlaksana dengan optimal.
4. Melakukan analisa terhadap beberapa indikator yang tidak tercapai sebagai bahan perbaikan pada tahun berikutnya.
6. Melakukan penyesuaian besaran target kegiatan dengan anggaran yang tersedia.

Sebagai upaya meningkatkan kinerja pada tahun 2025, maka dibuatkan Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan berdasarkan pencapaian kinerja tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Rencana Aksi dan Upaya Perbaikan Berdasarkan Pencapaian Kinerja
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi/Upaya Perbaikan
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat pada Perda/Perkada	Persentase Penurunan pelanggaran Trantibum dan pelanggaran Perda/Perkada	1. Melaksanakan penegakan Perda dan Perkada yang mengedepankan pendekatan persuasif dan upaya preventif dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada. 2. Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	1. Melakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor
		Kepatuhan Pengelolaan Keuangan	1. Peningkatan kapasitas pengelola keuangan melalui Bimtek bekerja sama dengan BKAD dan Inspektorat 2. Rekonsiliasi Barang Milik Daerah secara berkala, bekerja sama dengan BKAD



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Aksi/Upaya Perbaikan
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	1. Integrasi Program dan Kegiatan Inovasi dalam RKPD 2. Evaluasi secara berkelanjutan
		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda	1. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk penyelesaian temuan yang berkaitan dengan aset daerah.
3	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah	1. Peningkatan kualitas pelayanan

Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa mendatang di Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.

Bogor, 02 Februari 2026

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Bogor,,



Drs. PUPUNG WAHYU PURNAMA, M.Si.,

QGIA.,CGCAE.

NIP. 197007151990091002

